

PEMBACAAN PRAGMATISME MACHIAVELLI ATAS FENOMENA PROPAGANDA POLITIK PASCAKEBENARAN DI INDONESIA

Laurentius Florido Atu¹

¹Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

Pos-el/Phone number: floryatu2@gmail.com/081213664971

Diajukan: 19 Maret 2024; **Direview:** 19 April 2024; **Diterima:** Juni 2024; **Dipublish:** Juni 2024

Abstrak: Politik pascakebenaran adalah situasi politik yang menggunakan sentimen-sentimen kolektif untuk menarik simpati massa dan menjatuhkan lawan politis. Dalam politik semacam ini, kebenaran dan fakta tidak lagi menarik. Demokrasi tidak lagi menjadi arena untuk beradu gagasan, tetapi menjadi ajang provokasi lewat narasi kebencian dan kebohongan. Fenomena propaganda politik pascakebenaran ini telah menjadi fenomena global. Di Indonesia sendiri, terdapat dua bentuk propaganda politik pascakebenaran yang terjadi selama beberapa tahun terakhir, yakni politik identitas dan politik hoaks. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena propaganda politik pascakebenaran tersebut dalam perspektif pragmatisme Machiavelli. Machiavelli mengemukakan teori tentang politik yang bersifat pragmatis, yakni menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Fenomena propaganda politik pascakebenaran akan direlasikan dan dianalisis dengan menggunakan pemikiran pragmatis Machiavelli tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan membaca literatur-literatur terkait topik yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa ciri dari fenomena propaganda politik pascakebenaran di Indonesia. Ciri-ciri tersebut adalah fenomena propaganda politik pascakebenaran berorientasi pada tujuan pribadi dan kelompok di bidang politik, mengabaikan nilai dan norma agar tujuan tercapai, dan menempatkan prinsip kemenangan di atas segalanya. Dengan propaganda politik seperti ini, alih-alih mematangkan proses demokrasi, yang terjadi ialah pembusukan bagi nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Key words: propaganda, politik, pascakebenaran, pragmatisme, Machiavelli.

28 | **Pembacaan Pragmatisme Machiavelli atas Fenomena Propaganda Politik Pascakebenaran di Indonesia**

(Laurentius Florido Atu)

Pendahuluan

Pascakebenaran atau *post-truth* adalah sebuah istilah yang menggambarkan keunggulan emosi dan kepercayaan pribadi dalam memengaruhi opini publik daripada fakta-fakta objektif. Istilah tersebut digunakan pertama kali oleh Steve Tesich pada tahun 1992 untuk mengkritik masyarakat Amerika Serikat yang menerima begitu saja rangkaian kebohongan yang disampaikan oleh pemerintahan George W. Bush dalam rangka membenarkan serangan militer Amerika terhadap Irak. Masyarakat AS dengan sadar memilih untuk memercayai semua kebohongan sebagai fakta atau realitas.¹

Dalam era *post-truth* terjadi pengingkaran terhadap fakta objektif. Kebenaran dan kebohongan, kejujuran dan ketidakjujuran, serta fiksi dan nonfiksi sulit untuk dibedakan lagi. Dusta atau ketidakjujuran terjadi secara sporadis. Penipuan telah menjadi suatu tantangan, permainan, seni, kebiasaan, dan budaya. Dalam era tersebut, pendusta bahkan dapat mempunyai kedudukan dan status sosial yang tinggi dalam masyarakat.²

Perkembangan era pascakebenaran disebabkan oleh disrupsi digital. Kemajuan teknologi yang begitu pesat tidak saja membawa kemudahan bagi kehidupan manusia, tetapi juga memberi dampak yang negatif. Penyebaran informasi palsu (hoaks) mudah sekali terjadi di dalam dunia digital. Jika disebarkan terus menerus secara masif, hoaks akan berubah menjadi kebenaran. Dengan demikian, kebenaran lebih diciptakan daripada ditemukan. Hoaks pun mendapat status epistemis untuk menuntun praktik.³ Berkaitan dengan hal ini, beberapa kelompok dengan lihai memanfaatkan situasi tersebut untuk menciptakan instabilitas politik.

Realitas pascakebenaran telah menunjukkan eksistensinya dalam dunia politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Politik tidak lagi mengacu pada kebijakan, tetapi menggunakan daya tarik emosional seperti isu ras, agama, dan etnisitas untuk menggaet dukungan.⁴ Propaganda politik semacam ini tentu memberi dampak buruk bagi iklim demokrasi di Indonesia karena integritas prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti transparansi, partisipasi aktif, dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang akurat akan mengalami degradasi.⁵ Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis fenomena politik pascakebenaran di Indonesia.

Studi terdahulu mengenai fenomena propaganda politik di Indonesia pernah dilakukan oleh Budi Kurniawan dengan judul “Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan

¹ Widodo Dwi Putro dkk, *Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post-Truth*, Sanabil (Jakarta: Sanabil, 2020), hlm. 1.

² Valentino Lumowa, “Politik *Post-Truth* (Pascakebenaran) Sebagai Tantangan,” *Jurnal Majelis*, 10 (2019), hal 51.

³ F. Budi Hardiman, “Manusia dalam Prahara Revolusi Digital,” *Diskursus- Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara* 17:2 (2018), hlm. 187. <https://doi.org/10.36383/diskursus.v17i2.252>.

⁴ F. Budi Hardiman, *loc. cit.*

⁵ Angelita S. Walangarei dan Fitzgerald Kennedy Sitorus, “*Post-Truth*, Demokrasi, dan Kebutuhan Akan Literasi Media Kritis,” *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial (JKOMDIS)* 3:3 (2023), hlm. 803.

Ancaman Bagi Demokrasi”. Tulisan ini menganalisis politisasi agama yang terjadi di Indonesia, khususnya pada tahun politik 2018 dan 2019. Penelitian tersebut menemukan bahwa sentimen keagamaan kerap dimanfaatkan untuk kepentingan politik pragmatis.⁶

Selain itu, Abd Hannan juga pernah melakukan penelitian dengan judul “Propaganda Politik Pascakebenaran (*Post-Truth*) Menjelang Pemilu 2024 dan Ancamannya terhadap Demokrasi di Indonesia Kontemporer”. Fokus dari penelitian ini adalah mengkaji fenomena propaganda politik *post-truth* jelang Pilpres 2024 dan ancamannya terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia kontemporer. Menjelang Pilpres 2024, propaganda politik pascakebenaran mulai kembali ke ranah publik melalui berbagai propaganda politik yang muncul dalam bentuk isu-isu identitas.⁷

Berbeda dari studi-studi terdahulu di atas, tulisan ini hendak mengkaji fenomena politik pascakebenaran di Indonesia dalam perspektif teori pragmatisme Machiavelli. Machiavelli mengemukakan teori tentang politik yang bersifat pragmatis, yakni menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Fenomena propaganda politik pascakebenaran akan direlasikan dan dianalisis dengan menggunakan pemikiran pragmatis Machiavelli tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan mencari dan membaca literatur-literatur terkait topik yang dibahas. Setelah data-data dikumpulkan, penulis menganalisis dan mengeinterpretasi persamaan antara fenomena propaganda politik pascakebenaran di Indonesia dengan pragmatisme Machiavelli.

Fenomena Propaganda Politik Pascakebenaran di Indonesia

Politik pascakebenaran adalah situasi politik yang menggunakan sentimen-sentimen kolektif untuk menarik simpati massa dan menjatuhkan lawan politis. Dalam politik semacam ini, kebenaran dan fakta tidak lagi menarik. Demokrasi tidak lagi menjadi arena untuk beradu gagasan, tetapi menjadi ajang provokasi lewat narasi kebencian dan kebohongan. Fenomena propaganda politik pascakebenaran ini telah menjadi fenomena global.

Di Indonesia sendiri, terdapat dua bentuk politik pascakebenaran yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. *Pertama*, politik identitas. Politik identitas adalah cara-cara politis yang mengedepankan kepentingan-kepentingan suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik yang berbasiskan pada ras, etnisitas, gender, maupun keagamaan.⁸ Politik identitas dapat berarti positif dan negatif. Politik identitas itu positif jika berbasiskan pada solidaritas, moralitas, dan tujuan untuk mencapai hasil yang positif, yakni membebaskan yang tertindas dari penindasan. Namun, pemanfaatan identitas dalam propaganda politik akan bermakna negatif jika basisnya adalah doktrin kebencian, pemikiran sempit,

⁶ Budi Kurniawan, “Poltisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman Bagi Demokrasi,” *Jurnal Sosiologi Agama* 12:1 (2018), hlm. 133–154, <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-07>.

⁷ Abd Hannan, “Propaganda Politik Pascakebenaran (*Post-Truth*) Menjelang Pemilu 2024 dan Ancamannya terhadap Demokrasi di Indonesia Kontemporer,” *POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam* 6:1 (2022), hlm. 50–82.

⁸ Mansurni Abadia dkk., “Strategi Mitigasi Dampak Negatif Politik Identitas Sebelum dan Sesudah Pemilu,” *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4:2 (2023), hlm. 145.

30 | Pembacaan Pragmatisme Machiavelli atas Fenomena Propaganda Politik Pascakebenaran di Indonesia

(Laurentius Florido Atu)

kepemimpinan otoriter, perasaan akan keterasingan, dan keinginan untuk mendominasi ruang multikultural yang kemudian mengancam prinsip hidup bersama.⁹

Politik identitas di Indonesia seringkali memakai isu etnisitas dan keagamaan. Pemanfaatan isu-isu ini dilakukan untuk menyebarkan kebencian terhadap suatu kelompok. Dua contoh yang bisa diangkat adalah dikotomi partai Allah dan partai setan, serta dikotomi poros mekkah dan poros beijing. Dikotomi yang pertama diciptakan oleh Amien Rais. Dengan menggunakan doktrin agama, ia memprovokasi jemaat yang ada untuk mendukung partai Allah dan memarginalisasi kelompok yang diidentifikasi sebagai partai setan.¹⁰ Sementara itu, dikotomi kedua dikemukakan oleh Rizieq Shihab, mantan imam besar Front Pembela Islam (FPI). Terminologi poros mekkah dimaknai sebagai kubu yang islamis, religius, dan memiliki visi perubahan. Sedangkan, terminologi poros beijing didefinisikan sebagai kelompok China yang membawa penderitaan bagi masyarakat pribumi. Dikotomi ini pun pada akhirnya melahirkan sentimen anti-China pada sebagian kelompok.¹¹

Kedua, politik hoaks. Panorama politik di Indonesia masih terus dihiasi dengan saksi dusta, berita bohong, fitnah, dan informasi palsu. Sepanjang periode 2018 sampai dengan 2022 terdapat 1.318 hoaks politik. Beberapa contoh hoaks politik yang terjadi sepanjang 2022 adalah pemecatan ketua umum partai Nasional Demokrat (Nasdem), Surya Paloh oleh Presiden Jokowi; penunjukan Ahok sebagai menteri perdagangan oleh Presiden Jokowi; KPU menganulir keputusan peserta Pemilu 2024; Presiden Jokowi mundur sebagai Presiden pada September 2022; video Jokowi dan Iriana bagi-bagi kaus; Jokowi tiga periode; serta video Mahfud MD desak KPK agar menangkap Megawati.¹²

Selain itu, Masyarakat Antifitnah Indonesia bersama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menemukan 1.100 lebih informasi hoaks terkait pemilu sepanjang tahun 2023. Berita-berita bohong tersebut disebar melalui media sosial seperti Youtube, Facebook, Instagram, Tiktok, dan X.¹³ Salah satunya adalah video yang beredar di media sosial dengan narasi data hasil Pemilu 2024 dinyatakan sudah ada sebelum pemilu dimulai. Menanggapi isu tersebut, ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyebut bahwa video viral tersebut merupakan hal yang mengada-ada.¹⁴

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Budi Kurniawan, *op. cit.*, hlm. 143.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 144-45.

¹² Tim CNN Indonesia, "Hoaks Politik Mulai Naik Meski Belum Setinggi 2019," *CNN Indonesia*, 22 Desember 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221222180513-617-890935/hoaks-politik-mulai-naik-meski-belum-setinggi-2019-simak-daftarnya>. Diakses pada 14 Maret 2024.

¹³ Zulkarnaini, "Sepanjang Tahun Ini, 1.100 Informasi Hoaks Terkait Pemilu Beredar di Media Digital," *Kompas.id*, 24 Desember 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/12/24/sepanjang-2023-sebanyak-1100-informasi-hoaks-terkait-pemilu-beredar-di-media-digital>. Diakses pada 14 Maret 2024.

¹⁴ Tri Subarkah, "Viral Video Hasil Pemilu 2024 Sudah Jadi, KPU: Mengada-Ada," *Media Indonesia*, 27 April 2023, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/577042/viral-video-hasil-pemilu-2024-sudah-jadi-kpu-mengada-ada>. Diakses pada 15 Maret 2024.

Aneka hoaks politik tersebut melibatkan banyak orang di berbagai level. Penyebaran kebohongan tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang terlibat korupsi atau kasus-kasus kriminal lainnya. Namun, pengamat, lembaga tertentu (lembaga survei, dll), narasumber, tim sukses, para kandidat, pebisnis, politikus, penegak hukum, reporter, birokrat, kaum militer, dan lain-lain dapat menjadi agen-agen kepentingan tertentu untuk menambahkan kabut di sekitar kebenaran.¹⁵

Pemikiran Pragmatis Machiavelli tentang Politik

Niccolò Machiavelli adalah seorang filsuf, sejarawan, humanis, politisi, diplomat, filsuf, dan penulis asal Italia. Ia lahir pada 3 Mei 1469 di kota Florence, Itali dan kemudian meninggal pada umur 58 tahun. Machiavelli hidup di zaman yang diwarnai oleh perubahan sosial, politik, dan budaya yang signifikan. Saat itu, Italia terbagi menjadi banyak negara-kota yang saling berperang dan bersaing untuk meraih kekuasaan. Machiavelli terlibat secara aktif dalam urusan politik dan diplomatik. Ia memainkan peran penting dalam pemerintahan Republik Firenze.

Pada tahun 1512, setelah jatuhnya Republik Firenze, Machiavelli diasingkan. Di masa pengasingannya, ia menulis banyak karya yang menggambarkan pengalamannya dalam politik dan memberikan nasihat praktis kepada para pemimpin. Salah satu karya yang ditulisnya adalah *Il Principe (Sang Pangeran)*. Buku tersebut merupakan karya politik yang mengesampingkan pandangan tradisional tentang moralitas dan mengungkapkan prinsip-prinsip politik yang realistik dan pragmatis.¹⁶

Dalam *Il Principe* atau *The Prince*, Niccolò Machiavelli menjelaskan beberapa pokok pikiran terkait kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang penguasa. Pada bagian ini akan dibahas secara singkat beberapa pokok pikiran tersebut. *Pertama*, kemampuan mempertahankan kekuasaan. Machiavelli mengajarkan suatu pola kekuasaan despotik. Kekuasaan despotik harus dilakukan dengan kemunafikan, kelicikan, kebengisan, otoriter dan sebagainya demi kepentingan negara.¹⁷ Hal ini mengacu pada gagasannya tentang kekuasaan yang mesti diperoleh, digunakan dan dipertahankan semata-mata demi kekuasaan itu sendiri. Penyelenggaraan kekuasaan tidak boleh diintervensi oleh keutamaan-keutamaan moral, etis, religius ataupun kultural. Justru sebaliknya, agama dan moralitas dapat dijadikan alat untuk memperoleh dan memperbesar kekuasaan.¹⁸

Menurut Machiavelli, manusia adalah makhluk irasional yang ditentukan oleh emosi-emosinya. Karena itu, seorang penguasa harus bisa membentuk opini umum yang dapat mengendalikan tingkah laku

¹⁵ Valentino Lumowa, *op. cit.*, hlm. 52.

¹⁶ Muhammad Boim dkk., "Ulasan Buku 'Il Principe' (Sang Pangeran) Karya Niccolò Machiavelli," *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1:2 (2023), hlm. 59.

¹⁷ Innocentius Gerardo Mayolla, "Kualifikasi Penguasa Ideal Telaah Filsafat Politik Machiavelli terhadap Tokoh Frank Underwood dalam Serial TV House of Cards," *Forum* 50:1 (2021), hlm. 67, <https://doi.org/10.35312/forum.v50i1.323>.

¹⁸ Agustinus Pratisto Trinarso, "Mewaspada Kaum Pragmatis Machiavellian," dalam *Meninjau Ulang dan Menyikapi Pragmatisme Dewasa Ini* (Surabaya: Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 2015), hlm. 307.

32 | **Pembacaan Pragmatisme Machiavelli atas Fenomena Propaganda Politik Pascakebenaran di Indonesia**

(Laurentius Florido Atu)

masyarakat. Untuk memperoleh kekuasaan, seorang penguasa harus mampu membangkitkan nafsu-nafsu rendah warganya demi tujuan dan kepentingannya sendiri.¹⁹

Kedua, setengah manusia setengah binatang. Machiavelli menuliskan bahwa seorang penguasa harus memiliki kapasitas sifat seorang manusia sekaligus binatang. Manusia itu jahat sehingga penguasa harus mampu menggunakan sifat buruk ‘kebinatangan’ untuk meluhlantakkan ‘kebinatangan’ manusia. Machiavelli mengemukakan sifat-sifat “binatang” tak terpuji dan yang harus dimiliki oleh penguasa, seperti kikir, tamak, kejam, licik, sombong, keras kepala, tak bermoral dan tak beriman.²⁰ Sang Penguasa tidak perlu takut melakukan perbuatan jahat kalau kejahatan itu perlu demi keselamatan negara.²¹

Ketiga, penguasa harus mengutamakan tujuan dan bukan cara. Machiavelli dikenal sebagai orang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Yang terpenting adalah hasilnya dan bukan proses yang harus dilalui.²² Baginya, kekuasaan dan moralitas merupakan dua hal yang terpisah. Moral dipandang sebagai sesuatu yang berdiri sendiri dan merupakan bagian dari strategi kekuasaan. Moralitas tidak selamanya selalu berkaitan dengan persoalan baik dan buruk, tetapi bersifat realistik, obyektif, tidak universal, serta dinamis atau bisa berubah-ubah setiap waktu tergantung pada kondisi masyarakat. Tindakan baik yang dilakukan oleh penguasa kepada rakyat dalam membangun tatanan sosial dan politik yang baru terbentuk, dianggap sebagai bagian dari strategi kekuasaan untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan.²³

Pembacaan Pragmatisme Machiavelli atas Fenomena Politik Pascakebenaran

Setelah membahas sekilas tentang fenomena propaganda politik pascakebenaran di Indonesia dan pemikiran pragmatis Machiavelli, pada bagian ini akan dibahas hal yang menjadi inti dari tulisan ini. Penulis akan mencoba membaca fenomena propaganda politik pascakebenaran di Indonesia dengan menggunakan pendekatan pragmatisme Machiavelli. Terdapat beberapa ciri fenomena politik pascakebenaran jika dikaitkan dengan pragmatisme Machiavelli. *Pertama*, orientasi pada tujuan pribadi atau kelompok di bidang politik. Dalam pragmatisme Machiavelli, kebijakan, agama, dan moralitas harus dijadikan alat untuk memperoleh dan memperluas kekuasaan. Kekayaan dan kejayaan merupakan dua hal yang harus dikejar oleh seorang penguasa. Penguasa bukanlah pengemban keutamaan-keutamaan moral. Dalam situasi yang mendesak atau tuntutan situasi tertentu, seorang penguasa dapat memanfaatkan dan melakukan kekejaman untuk menyelesaikan masalah. Baginya, politik semata-mata hanya berkaitan dengan upaya memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.²⁴

¹⁹ F. Budi Hardiman, *Pemikiran Modern dari Machiavelli Sampai Nietzsche* (Yogyakarta: Kanisius, 2019), hlm. 19.

²⁰ Jan Hendrik Rapar, *Filsafat Politik Machiavelli* (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 81.

²¹ Niccolo Machiavelli, *Sang Penguasa*, trans. C. Woekirsari (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 64.

²² Innocentius Gerardo Mayolla, *op.cit.*, hlm. 71.

²³ Niccolo Machiavelli, *op. cit.*, hlm. 34-39.

²⁴ Haura Atthahara, “Perspektif Ideologi dan Kekuasaan dalam Pemikiran: Studi Kasus Pemilihan Umum Presiden,” *Jurnal JISIPOL* 4:1 (2020), hlm. 90.

Pragmatisme Machiavelli tersebut tampak jelas dalam fenomena politik pascakebenaran di Indonesia. Propaganda politik yang dilakukan oleh para politisi dengan menyebarkan hoaks hanyalah usaha untuk memperjuangkan tujuan atau kepentingan pribadi dan kelompok daripada kesejahteraan masyarakat. Narasi yang dibangun lebih banyak dibumbui oleh fitnah, *nyinyir*, saling menghujat dan lain sebagainya yang tujuannya ialah untuk mendestruksi lawan demi meraih keuntungan politik. Selain itu, pemanfaatan isu keagamaan dan etnisitas dalam bidang politik juga dilakukan atas dasar kesengajaan dan kesadaran untuk memecah-belah persatuan bangsa demi kepentingan kelompok tertentu. Agama dijadikan sebagai senjata yang ampuh dan laris untuk memuluskan usaha meraih kekuasaan. Dampak negatif dari politik semacam ini, seperti diskriminasi dan rusaknya keberagaman dan kesetaraan, tidak dihiraukan. Yang paling penting adalah tujuan mereka untuk mendapatkan kekuasaan dapat tercapai.

Kedua, pengabaian nilai dan norma agar tujuan tercapai. Bagi Machiavelli, kekuasaan merupakan sebuah tujuan. Moral ataupun agama hanyalah sarana yang bisa digunakan untuk dapat menggapai kekuasaan. Kekuasaan bukanlah cara untuk meraih sesuatu yang lain, melainkan inti yang mesti dicapai oleh seorang penguasa atau yang ingin berkuasa. Dengan perkataan lain, kekuasaan adalah segalanya. Karena itu, upaya untuk mengejar dan mempertahankan kekuasaan politik tidak perlu dinilai berdasarkan standar moral. Keputusan dan tindakan politik tidak boleh dibatasi oleh nilai-nilai moral tradisional. Seseorang yang telah memegang kekuasaan dapat berbuat hal-hal yang terpuji dan tidak terpuji.²⁵

Pengabaian terhadap nilai dan moral dalam propaganda politik pascakebenaran dapat dilihat ketika kebohongan, ujaran kebencian, intimidasi, dan manipulasi menjadi jalan politik yang dipilih oleh penguasa atau politisi. Di sini, ruang diskursus politik kita mengalami krisis kearifan dan etika. Gagasan-gagasan substansial yang seharusnya ada dalam kontestasi politik menjadi terabaikan. Solidaritas dan etos gotong royong yang merupakan modal sosial untuk membangun demokrasi akan rusak ketika panorama politik dihiasi oleh aneka kebohongan dan narasi kebencian. Hal ini dapat dilihat dalam Pilkada DKI 2017 hingga di Pilpres 2019 yang dipenuhi dengan penyebutan asing-aseng, tuduhan komunis, maraknya istilah cebong-kampret, narasi Indonesia bubar, air laut masuk Jakarta, terusirnya kaum pribumi, politik sontoloyo, politik genderuwo, dan lain sebagainya. Dengan perilaku politik seperti ini, alih-alih mematangkan proses demokrasi, yang terjadi ialah pembusukan bagi nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Ketiga, menempatkan prinsip kemenangan di atas segalanya. Prinsip kemenangan memang bukanlah hal yang salah. Setiap orang memiliki hak untuk berjuang meraih kemenangan dalam kontestasi politik. Akan tetapi, prinsip ini menjadi salah ketika ditempatkan di atas segalanya. Menempatkan kemenangan sebagai prioritas utama dan mengabaikan nilai dan moralitas merupakan pandangan yang dapat merusak iklim demokrasi. Dalam prinsip tersebut, rakyat dan lawan politik hanya dipandang sebagai obyek dan sarana untuk mencapai kemenangan. Pandangan seperti ini melecehkan manusia sebagai pribadi yang bermartabat. Hal ini pada akhirnya hanya akan mendorong timbulnya aksi-aksi kekerasan, diskriminasi, ketidakadilan sosial dan eksploitasi.

²⁵ Niccolo Machiavelli, *op.cit.*, hlm. 11-16.

Pembacaan Pragmatisme Machiavelli atas Fenomena Propaganda Politik Pascakebenaran di Indonesia

(Laurentius Florido Atu)

Politik dalam pandangan Machiavelli hanya digunakan untuk menyebut dan mengingatkan para pangeran (kelompok elite) bahwa mereka benar-benar saling berperang demi kekuasaan, bukan demi prinsip-prinsip mulia yang seringkali diobrolkan.²⁶ Di sini, prinsip etika diabaikan. Yang paling penting bagi penguasa adalah meraih kemenangan dengan mengalahkan yang lain, meskipun menggunakan cara-cara, siasat, dan strategi yang licik. Machiavelli mengizinkan penggunaan cara-cara yang tercela bagi rakyat demi kekuasaan.

Prinsip menempatkan kemenangan di atas segalanya terkandung juga dalam propaganda politik pascakebenaran. Penyebaran hoaks dan pemanfaatan isu-isu identitas, seperti etnisitas dan keagamaan adalah bentuk pengobjekkan terhadap rakyat dan lawan politis. Rakyat dipandang bukan sebagai pribadi yang patut dihargai dan dihormati, melainkan alat untuk meraih kemenangan politik. Rakyat adalah objek yang bisa dimanfaatkan untuk memperoleh kekuasaan. Selain itu, politik tersebut juga berdampak pada diskriminasi dan intimidasi terhadap kelompok lain yang merupakan bentuk pelecehan terhadap martabat manusia yang mestinya dihargai dan dihormati.

Penutup

Propaganda politik pascakebenaran di Indonesia nampak dalam dua bentuk yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Kedua bentuk propaganda tersebut adalah politik identitas dan politik hoaks. Fenomena-fenomena ini memiliki beberapa ciri, antara lain berorientasi pada tujuan pribadi atau kelompok di bidang politik, mengabaikan nilai dan norma agar tujuan tercapai, dan menempatkan prinsip kemenangan di atas segalanya .

Ketiga ciri di atas berhubungan erat dengan pemikiran pragmatis Niccolò Machiavelli. Machiavelli mengemukakan beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh penguasa. *Pertama*, kemampuan mempertahankan kekuasaan, meskipun harus dilakukan dengan kemunafikan dan kelicikan. *Kedua*, sifat setengah manusia sekaligus setengah binatang. Seorang penguasa harus mampu menggunakan sifat-sifat kebinatangannya, seperti kekejaman, kebohongan, kemunafikan dan lain sebagainya demi meraih dan mempertahankan kekuasaan. *Ketiga*, penguasa harus mengutamakan tujuan meskipun dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau moral.

Pada prinsipnya, fenomena propaganda politik pascakebenaran menjadi tantangan serius yang harus segera dicarikan solusinya. Beberapa solusi yang ditawarkan di sini adalah peningkatan literasi digital dan juridifikasi interaksi digital. Literasi memungkinkan setiap orang untuk dapat membedakan antara informasi yang benar dan informasi yang salah. Selain itu, juridifikasi interaksi digital juga merupakan hal yang penting untuk menata ruang digital lewat hukum.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 91.

Daftar Pustaka

- Abadia, Mansurni, Cenruang Alungb, Iman Permadic, dan Yana Schovad. “Strategi Mitigasi Dampak Negatif Politik Identitas Sebelum dan Sesudah Pemilu.” *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4:2 (2023): 142–65.
- Atthahara, Haura. “Perspektif Ideologi dan Kekuasaan dalam Pemikiran: Studi Kasus Pemilihan Umum Presiden.” *Jurnal JISIPOL* 4:1 (2020): 85–100.
- Boim, Muhammad dkk. “Ulasan Buku ‘Il Principe’(Sang Pangeran) Karya Niccolo Machiavelli.” *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1:2 (2023): 58–63.
- Widodo Dwi Putro dkk. *Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post-Truth*. Sanabil. Jakarta: Sanabil, 2020.
- Hannan, Abd. “Propaganda Politik Pascakebenaran (*Post-Truth*) Menjelang Pemilu 2024 dan Ancamannya terhadap Demokrasi Di Indonesia Kontemporer.” *POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam* 6:1 (2022): 50–82.
- Hardiman, F. Budi. “Manusia dalam Prahara Revolusi Digital.” *Diskursus- Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara* 17:2 (2018). <https://doi.org/10.36383/diskursus.v17i2.252>.
- . *Pemikiran Modern Dari Machiavelli Sampai Nietzsche*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- Kurniawan, Budi. “Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman Bagi Demokrasi.” *Jurnal Sosiologi Agama* 12:1 (2018): 133–54.
- Lumowa, Valentino. “Politik *Post-Truth* (Pascakebenaran) Sebagai Tantangan.” *Jurnal Majelis*, 10 (2019).
- Machiavelli, Niccolo. *Sang Penguasa*. Translated by C. Woekirsari. Jakarta: Gramedia, 1987.
- Mayolla, Innocentius Gerardo. “Kualifikasi Penguasa Ideal Telaah Filsafat Politik Machievelli terhadap Tokoh Frank Underwood dalam Serial TV House of Cards.” *Forum* 50:1 (2021): 62–75. <https://doi.org/10.35312/forum.v50i1.323>.

Pembacaan Pragmatisme Machiavelli atas Fenomena Propaganda Politik Pascakebenaran di Indonesia

(Laurentius Florido Atu)

Rapar, Jan Hendrik. *Filsafat Politik Machiavelli*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.

Subarkah, Tri. “Viral Video Hasil Pemilu 2024 Sudah Jadi, KPU: Mengada-Ada.” *Media Indonesia*, 2023. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/577042/viral-video-hasil-pemilu-2024-sudah-jadi-kpu-mengada-ada>, diakses pada 15 Maret 2024.

Tim CNN Indonesia. “Hoaks Politik Mulai Naik Meski Belum Setinggi 2019.” *CNN Indonesia*, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221222180513-617-890935/hoaks-politik-mulai-naik-meski-belum-setinggi-2019-simak-daftarnya>, diakses pada 14 Maret 2024.

Trinarso, Agustinus Pratisto. “Mewaspada Kaum Pragmatis Machiavellian.” dalam *Meninjau Ulang dan Menyikapi Pragmatisme Dewasa Ini*. Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 2015.

Walangarei, Angelita S., dan Fitzgerald Kennedy Sitorus. “*Post - Truth* , Demokrasi , dan Kebutuhan Akan Literasi Media Kritis.” *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial (JKOMDIS)* 3:3 (2023): 802–5.

Zulkarnaini. “Sepanjang Tahun Ini, 1.100 Informasi Hoaks Terkait Pemilu Beredar di Media Digital.” *Kompas.id*, 2023. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/12/24/sepanjang-2023-sebanyak-1100-informasi-hoaks-terkait-pemilu-beredar-di-media-digital>, diakses pada 14 Maret 2024.